



Pariwisata Badung Berbasis Kerakyatan



PENARI BALI: Pariwisata di Kabupaten Badung menjadi maju karena dukungan dari masyarakat.

BADUNG - Badung merupakan salah satu kabupaten di provinsi Bali yang sejak sebelum kemerdekaan (tahun 1930) sudah mulai mengembangkan pariwisata. Sebelumnya masyarakat Badung kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga hasilnya *pas-pasan*.

Namun tidak banyak yang tahu, jika pariwisata yang tumbuh di Badung, awalnya adalah secara tidak sengaja. Pendapat tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Made Subawa di depan peserta kunjungan kerja/orientasi kehumasan Pemerintah, Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (19/11).

Awalnya, kisah made, datang orang asing dari Denmark. Tertarik dengan keindahan alam Badung, *bule* tersebut meminta kepada masyarakat di sana untuk membangun *homestay* yang ada

di rumah adat. Lambat laun wisatawan asing yang berkunjung ke surganya dunia itu semakin banyak. Peluang ini kemudian ditangkap masyarakat dengan mendirikan hotel, restoran.

Seiring dengan kemajuan pariwisata lanjut Made, datang sejumlah investor yang menanamkan modalnya dengan membangun hotel berbintang dan tempat hiburan seperti pub, cafe dan sebagainya.

"Jadi, sejak awal pariwisata di sini berbasis kemasyarakatan. Karena sekarang banyak hotel-hotel maupun manajemennya dari luar, maka ke depan kami membuat program pariwisata berbasis kerakyatan," tambah Made.

Selanjutnya Made mengatakan emas dan permata bagi Badung adalah hotel dan restoran. Model pemerintah di Badung ada dua sistem yaitu dinas dan

1. Walikota
2. Wakil W
3. Sekretaris
4. Asisten

INSTANSI

NILAI BERKURANG

SIPAT

KEPERLUAN

LANJUT

adat. Kedua sistem tersebut hidup berdampingan, Perhatian pemerintah terhadap masyarakat nyata. Hal ini bisa dilihat dari setiap desa adat mendapat kontribusi sebesar Rp 100 juta per tahun, sedangkan dinas hanya sekitar Rp 75 juta per tahun.

"Karena di desa itulah simpul-simpul adat budaya yang menyebabkan lestari/utuh. Karena hal itu dikembangkan oleh kekuatan-kekuatan adat," jelas dia.

Agar pariwisata berbasis kerakyatan lebih berkembang, Made menambahkan, rencananya mulai tahun depan akan dikembangkan desa wisata yang dikelola sendiri oleh desa.

"Jadi, masyarakat yang menyediakan pemondokan tidak perlu membangun lagi. Di rumah penduduk yang kamarnya kosong, bisa dikelola menjadi pondok wisata. Setiap rumah maksimal menye-

diakan lima kamar. Sistem manajemen menjadi satu dengan sistem desa dan yang mengontrol tamu juga desa," jelas dia.

Kalau ada lima kamar hanya perlu tiga *room boy*, sedangkan yang bertugas sebagai *security* dan *garder dinner* pemilik rumah sendiri. "Sehingga kesempatan kerja, ekonomi, keindahan, kebersihan, kesehatan dan pendidikan akan meningkat," ungkap Made.

Mendapat penjelasan mengenai pariwisata di Badung, Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Kota Yogyakarta, Sukirno mengaku cukup bangga dengan tingginya peran serta masyarakat.

"Pariwisata di Bali sungguh luar biasa, Pemerintah Kota Yogyakarta tertarik dan ingin menimba ilmu bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat di Badung mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan," tegasnya. ■ nri

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 03 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005